



## Arahan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto

### *Directions for Prevention and Quality Improvement of Slum Settlements in Binamu District, Jeneponto Regency*

Ameliya Magfirah<sup>1</sup>, Syafri<sup>2</sup>, Rusneni Ruslan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa

<sup>2</sup> Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

[ameliya.magfirah@gmail.com](mailto:ameliya.magfirah@gmail.com)

#### Artikel info

##### Artikel history:

Diterima;25-09-2022

Direvisi;04-10-2022

Disetujui;04-10-2022

**Abstract.** *This study aims to analyze the causes of slums and determine the direction of prevention and improvement of the quality of slum settlements in the Biringjene Area, Binamu District, and Jeneponto Regency. This type of research is mixed-methods research. To analyze the factors that cause slums in the Biringjene area, Binamu District, and Jeneponto Regency, the Analytical Hierarchy Process analysis tool is used to formulate the direction of prevention and improvement quality improvement in the Biringjene area, qualitative descriptive analysis is used. Based on the results of the Analytical Hierachy Process, the main conclusion in this study showed that the factors causing slums in the Biringjene Region, Binamu District, and Jeneponto Regency were socio-economic factors. This is due to the low income of the community, the unequal distribution of jobs, and the low level of education. The direction of prevention and quality improvement in the Biringjene Area, Binamu District, Jeneponto Regency is clarity through control, community empowerment, rejuvenation, and resettlement.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis faktor penyebab kumuh dan menentukan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini merupakan penelitian *mix method*. Untuk menganalisis faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto menggunakan alat analisis *Analytical Hierarchy Process* sedangkan untuk merumuskan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan utama dalam penelitian ini yaitu berdasarkan hasil *Analytical Hierachy Process* menunjukkan bahwa faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yaitu faktor sosial ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat, tidak meratanya pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Adapun arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dilaksanakan melalui pola pengawasan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat serta pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali

---

**Keywords:**

Arahan;  
Pencegahan;  
Peningkatan  
Kualitas Kumuh;

**Corresponden author:**

Email: ameliya.magfirah@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

---

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan kota merupakan fungsi waktu yang merupakan proses perubahan keadaan dari satu waktu ke waktu yang lain (Yunus, 2000 dalam Suparno dkk., 2021). Meningkatnya pertumbuhan penduduk serta aktivitasnya berdampak pada kebutuhan lahan untuk permukiman. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan pendanaan dan sistem pembiayaan, serta masyarakat terkoordinasi dan terpadu (UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lingkungan dimana manusia tinggal, berkembang serta melangsungkan hidupnya (Budiharjo, 2009 dalam Suparno dkk., 2021). Pada hakikatnya, permukiman merupakan lingkungan dimana masyarakat mempengaruhi dan memanfaatkan lingkungan tersebut. Permukiman memiliki dua arti yang berbeda, yaitu isi yang menunjuk pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat lingkungan sekitar, dan wadah yang menunjuk pada fisik hunian terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia (Sastra & Marlina, 2006 dalam Suparno dkk., 2021).

Pesatnya pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ruang bermukim menyebabkan pembangunan rumah tipe moderen dan tempat-tempat untuk usaha oleh masyarakat sendiri terus bertambah. Pembangunan yang tidak disertai dengan pengaturan dan pengendalian yang baik menjadikan lingkungan menjadi kumuh, tidak teratur, tidak nyaman dan tidak sehat.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus, dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 299-a Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto bahwa telah tercatat 42 desa/kelurahan yang termasuk wilayah kumuh dari 113 desa/kelurahan, salah satunya di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tercatat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Binamu pada tahun 2020 sebanyak 63.570 jiwa. Sebanyak 7.732 jiwa atau 1.933 kepala keluarga dari keseluruhan penduduk Kecamatan Binamu yang menetap di kawasan kumuh.

Berbicara mengenai kualitas lingkungan permukiman, salah satu kawasan di Kecamatan Binamu yaitu Kawasan Biringjene merupakan daerah di kawasan pesisir yang nampaknya patut diperhatikan. Sebagian masyarakat hidup dengan kualitas lingkungan yang rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi lingkungan permukiman itu dapat dilihat pada rumah penduduk yang merupakan bangunan yang tidak permanen, jalan-jalan yang belum diaspal, sulitnya air bersih dan saluran air yang tidak teratur, pembuangan kotoran sembarangan serta perilaku warga yang tidak mempertimbangkan kebersihan maupun kesehatan dengan membuang air limbah rumah tangga di sungai yang mengakibatkan sampah menumpuk dan bau tidak sedap tak terbendung lagi. Seperti yang diketahui, Kecamatan Binamu merupakan ibu kota kabupaten di Kabupaten Jeneponto. Hal ini sebanding dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga tidak heran jika Kawasan Biringjene memiliki kondisi permukiman yang dapat di kategorikan kumuh sesuai dengan parameter.

## 2. METODE

### 2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Biringjene, Lingkungan Tanrusampe Barat dan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu kawasan dengan klasifikasi kumuh sedang berdasarkan SK Bupati Jeneponto Nomor 299-a Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto.

### 2.2. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013), jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif contohnya adalah seperti data luas wilayah, Jumlah sarana dan prasarana, dan jumlah pengunjung atau wisatawan. Sedangkan data kualitatif contohnya adalah seperti gambaran mengenai letak geografis wilayah penelitian, kondisi objek wisata, sebaran kuesioner dan lain sebagainya

### 2.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability* dengan *teknik stakeholder analysis*. Lansiluoto et al. (Ma dkk., 2018) menyatakan bahwa stakeholders dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu stakeholder utama (*primary stakeholders*) dan stakeholder lainnya atau pendukung (*secondary stakeholders*). Adapun hasil analisis *stakeholder* yaitu sebagai berikut

**Tabel 1.** Penentuan *Stakeholder* dalam Penelitian

No	Komponen	<i>Stakeholders</i>	Kepentingan	Peran <i>Stakeholders</i>
1		Bappeda Kabupaten Jeneponto	Memiliki kepentingan untuk menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	<i>Stakeholder</i> Utama
2	Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jeneponto	Memiliki kepentingan menjadi <i>leader</i> untuk melaksanakan penataan ruang di wilayah Kabupaten Jeneponto yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian	<i>Stakeholder</i> Utama
3		Dinas Kawasan Perumahan, dan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto	Memiliki kepentingan untuk melaksanakan urusan bidang perencanaan teknis, bidang bangunan gedung, bidang perumahan dan permukiman serta bidang pengawasan dan pengendalian	<i>Stakeholder</i> Utama

No	Komponen	Stakeholders	Kepentingan	Peran Stakeholders	
4		Lurah Pabiringa	Kelurahan	Mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum permukiman di wilayah Kelurahan	Stakeholder Utama
5	Akademisi	Dosen PWK Universitas Bosowa		Memiliki kepentingan dalam memberikan sudut pandang keilmuan tentang perumahan dan permukiman terhadap permasalahan permukiman kumuh	Stakeholder Pendukung
6	Masyarakat	Ketua Lingkungan		Mewakili kelompok masyarakat yang menghuni dan mengetahui kondisi permukiman	Stakeholder Utama

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2022

#### 2.4. Metode Analisis

Adapun metode analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### a. Analytical Hierachy Process (AHP)

AHP merupakan salah satu teknik untuk membantu pengambilan keputusan yang komprehensif karena sifatnya yang multi atribut untuk menangani masalah yang kompleks baik aspek kualitatif dan kuantitatif. AHP (*Analytical Hierachy Process*) merupakan suatu metode dalam sistem pengambilan keputusan yang menggunakan beberapa variabel dengan proses analisis bertingkat. Analisis dilakukan dengan memberi nilai prioritas dari tiap-tiap variabel, kemudian melakukan perbandingan berpasangan dari variabel-variabel tersebut dan alternatif-alternatif yang ada (Saaty, 1987).

AHP memiliki prinsip untuk menyederhanakan permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur serta menatanya dalam hirarki-hirarki. Tingkat kepentingan tiap-tiap variabel diberi nilai numerik secara subjektif tentang arti penting variabel tersebut dibandingkan dengan variabel lainnya. Selanjutnya dilakukan sintesa untuk menentukan variabel yang memiliki prioritas tinggi dan berperan untuk mempengaruhi hasil pada sistem tersebut. Adapun langkah-langkah dalam metode AHP (Saaty, 1987) yaitu sebagai berikut.

##### 1) Menyusun hierarki permasalahan

Penyusunan hierarki ini berdasarkan jenis keputusan yang diambil. Pada tingkat puncak, hirarki hanya terdiri dari satu elemen yang disebut tujuan, yaitu sasaran keseluruhan yang bersifat luas. Tingkat selanjutnya dapat terdiri dari beberapa elemen yang dibagi dalam kelompok homogen, agar dapat dibandingkan dengan elemen-elemen tingkat sebelumnya.

##### 2) Penilaian kriteria alternatif

Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat (Saaty, 1987). Nilai dan definisi pendapat kualitatif dalam skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.** Skala Prioritas Faktor Pembanding dalam AHP

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan

Intensitas Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen di banding elemen lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian saling kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lain
7	Satu elemen jelas lebih penting mutlak dari elemen lain	Satu elemen yang kuat didukung dan dominan terhadap praktek
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lain	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memenuhi tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara 2 nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai yang diberikan bila ada 2 kompromi diantara 2 pilihan

Sumber: Saaty, 1987

### 3) Penentuan prioritas

Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik. Dalam penelitian ini akan digunakan software Expert Choice dalam melakukan tahap ini.

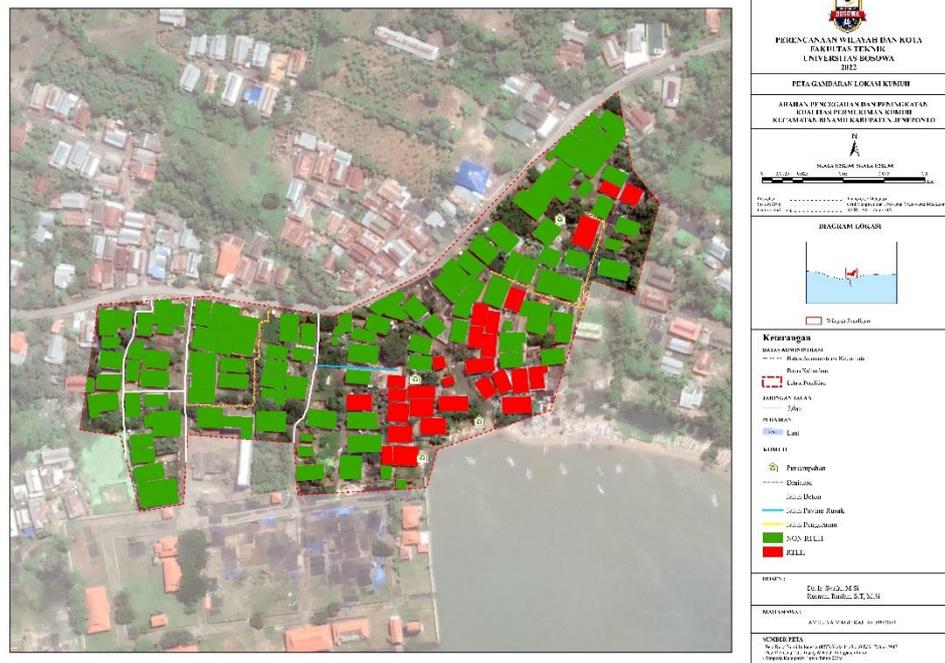
#### b. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016) Sumber informasi dalam analisis ini terdiri dari gambaran umum atau fakta empirik dari variabel penyebab kekumuhan, dan kebijakan terkait sehingga menghasilkan arahan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

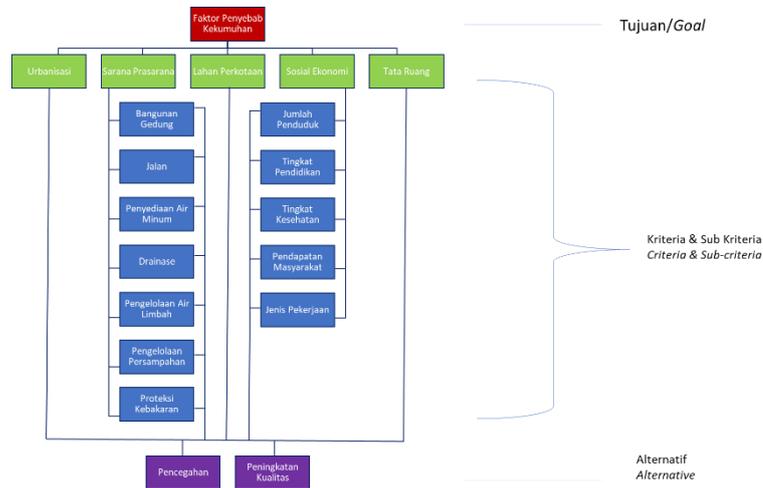
Lokasi penelitian terletak di Kawasan Biringjene, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, lebih tepatnya berada di Lingkungan Tanrusampe Barat dan Lingkungan Tanrusampe Timur dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini merupakan kawasan yang menjadi lokasi permukiman kumuh sedang berdasarkan SK Bupati Jeneponto Nomor 299-a Tahun 2-16 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jeneponto. Secara administrasi Kawasan Biringjene memiliki luas 3.90 ha yang terbagi atas 2 lingkungan dan 2 RT, dengan letak geografis LS 5° 42' 2,827" BT 119° 42' 30,267".



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

### 3.2. Analisis Penyebab Kekumuhan

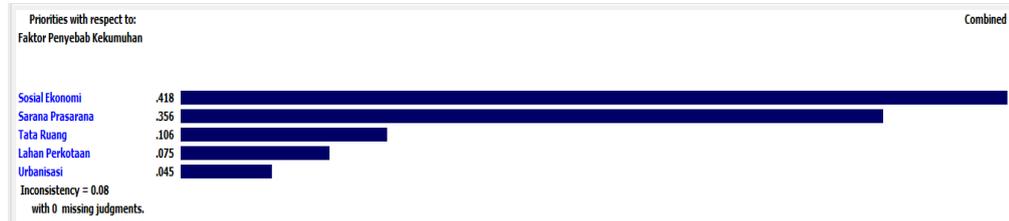
Untuk menjawab penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP), dimana terdapat 6 stakeholders yang memberikan pertimbangannya dalam menentukan penyebab kekumuhan. Berdasarkan Teori Saaty (2008), dibutuhkan tujuan (*goal*), kriteria (*criteria*), sub-kriteria (*sub-criteria*) dan alternatif (*alternative*) untuk menyusun struktur hierarki AHP. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah menentukan penyebab kekumuhan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan, kriterianya adalah faktor-faktor penyebab kumuh, sedangkan sub-kriterianya adalah indikator-indikator dari faktor penyebab kumuh. Adapun struktur hierarki dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Hierarki dalam Penelitian

#### a. Hasil Analisis Antar Kriteria

Berdasarkan hasil analisis antar kriteria menghasilkan nilai inconsistency sebesar 0,08 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 1%. Adapun faktor penyebab beserta bobotnya dari tinggi ke rendah adalah sosial ekonomi (0,418), sarana prasarana (0,356), tata ruang (0,106), lahan perkotaan (0,075), dan bobot terendah yaitu urbanisasi (0,045). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada diagram berikut



**Gambar 3.** Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Kriteria

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa variabel sosial ekonomi merupakan faktor dengan bobot tertinggi dan menjadi penyebab kekumuhan.

b. Hasil Analisis Antar Sub Kriteria

1) Urbanisasi

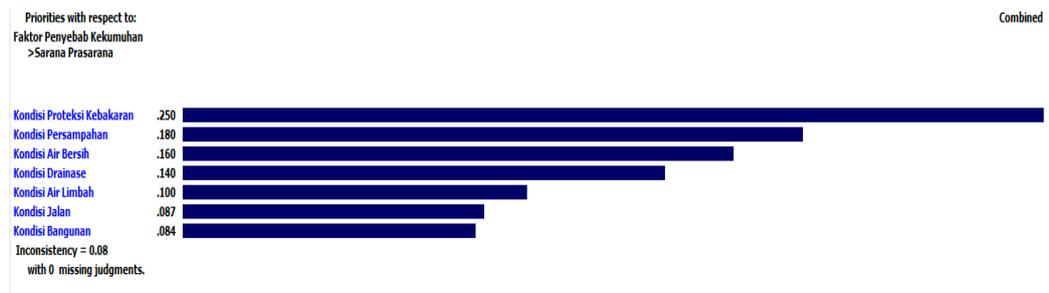
Hanya terdapat satu indikator pada sub variabel ini, yaitu urbanisasi, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya.

2) Lahan Perkotaan

Hanya terdapat satu indikator pada sub variabel ini, yaitu lahan perkotaan, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya.

3) Sarana Prasarana

Hasil analisis antar sub kriteria sarana prasarana menghasilkan nilai inconsistency sebesar 0,08 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini dibawah 1%. Nilai bobot penyebab kekumuhan dari tinggi ke rendah yaitu kondisi proteksi kebakaran (0,250), kondisi persampahan (0,180), kondisi air bersih (0,160), kondisi drainase (0,140), kondisi air limbah (0,100), kondisi jalan (0,087) dan kondisi bangunan (0,084). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada diagram berikut.

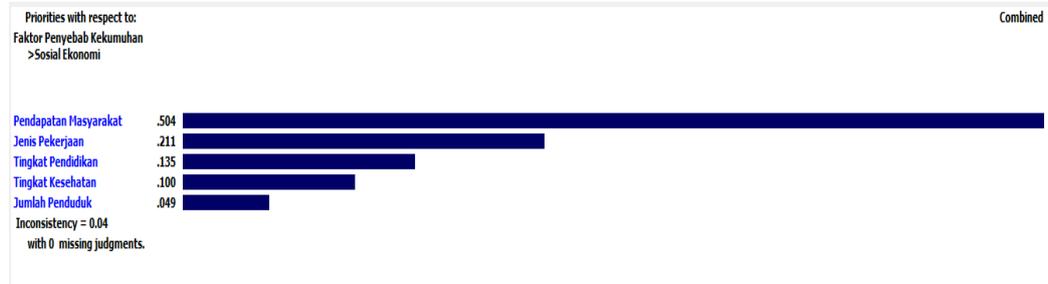


**Gambar 4.** Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Sub Kriteria Sarana Prasarana

Berdasarkan diagram diatas menunjukkan bahwa penyebab kekumuhan ditinjau dari sarana prasarana di Kawasan Biringjene yaitu kondisi proteksi kebakaran. Hal ini disebabkan karena pada lokasi penelitian tidak tersedianya sarana dan prasarana proteksi kebakaran.

4) Sosial Ekonomi

Hasil analisis antar sub kriteria sosial ekonomi menghasilkan nilai inconsistency sebesar 0,04 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini dibawah 1%. Penyebab kekumuhan beserta bobotnya dari tinggi ke rendah adalah pendapatan masyarakat (0,504), jenis pekerjaan (0,211), tingkat pendidikan (0,135), tingkat kesehatan (0,100), dan bobot terendah sub kriteria jumlah penduduk (0,049). Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada diagram berikut.



Gambar 4. Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepentingan Antar Sub Kriteria Sosial Ekonomi

5) Tata Ruang

Hanya terdapat satu indikator pada sub variabel ini, yaitu tata ruang, sehingga tidak dapat disusun hirarkinya.

Setelah melakukan perhitungan, data kemudian akumulasikan untuk melihat faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Faktor Penyebab Kekumuhan

Kriteria	Sub Kriteria
Urbanisasi (0,045)	Migrasi Penduduk
Lahan Perkotaan (0,075)	Penggunaan Lahan
Sarana Prasarana (0,356)	Kondisi Bangunan (0,084)
	Kondisi Jalan (0,087)
	Kondisi Drainase (0,140)
	Kondisi Air Bersih (0,160)
	Kondisi Limbah (0,100)
	Kondisi Persampahan (0,180)
	Kondisi Proteksi Kebakaran (0,250)
Sosial Ekonomi (0,418)	Jumlah Penduduk (0,049)
	Tingkat Pendidikan (0,135)
	Tingkat Kesehatan (0,100)
	Pendapatan Masyarakat (0,504)
	Jenis Pekerjaan (0,211)

Kriteria	Sub Kriteria
Tata Ruang (0,106)	Simpangan Pola Ruang dan Penggunaan Lahan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel dan diagram diatas menunjukkan bahwa menurut pendapat *stakeholder*, faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene yaitu faktor sosial ekonomi dan faktor sarana prasarana. Faktor pertama yaitu faktor sosial ekonomi, yang menjadi penyebab kekumuhan yaitu pendapatan masyarakat, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya untuk faktor sarana prasarana, yang menjadi penyebab kekumuhan yaitu kondisi proteksi kebakaran, kondisi persampahan, dan kondisi air bersih.

### 3.3. Analisis Penentuan Arah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Dalam penentuan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif dari hasil analisis AHP untuk menentukan rumusan strategi. Penilaian secara keseluruhan perlu dilakukan untuk mengetahui alternatif terbaik menurut pendapat *stakeholder*. Adapun rumusan strategi menurut para *stakeholder* sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 4.** Rekapitulasi Nilai Alternatif

Kriteria	Sub Kriteria	Pencegahan	Peningkatan Kualitas
Urbanisasi (0,045)	Migrasi Penduduk	0.718	0.282
Lahan Perkotaan (0,075)	Penggunaan Lahan	0.459	0.541
	Kondisi Bangunan (0,084)	0.802	0.198
	Kondisi Jalan (0,087)	0.403	0.597
	Kondisi Drainase (0,140)	0.325	0.675
Sarana Prasarana (0,356)	Kondisi Air Bersih (0,160)	0.198	0.802
	Kondisi Limbah (0,100)	0.167	0.833
	Kondisi Persampahan (0,180)	0.138	0.862
	Kondisi Proteksi Kebakaran (0,250)	0.108	0.892
Sosial Ekonomi (0,418)	Jumlah Penduduk (0,049)	0.634	0.366
	Tingkat Pendidikan (0,135)	0.602	0.398
	Tingkat Kesehatan (0,100)	0.686	0.314
	Pendapatan Masyarakat (0,504)	0.458	0.542
	Jenis Pekerjaan (0,211)	0.618	0.382
Tata Ruang (0,106)	Simpangan Pola Ruang dan Penggunaan Lahan	0.607	0.393

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa menurut pendapat stakeholder, strategi penanganan kumuh di Kawasan Biringjene yaitu dengan kegiatan peningkatan kualitas.

Setelah mendapatkan rumusan strategi menurut pendapat expert, maka untuk mendapatkan arahan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh menggunakan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan Permen PUPR No.14 Tahun 2018.

### **Tabel 5.** Penentuan Arah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Aspek Yang Diamati	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
Urbanisasi	Pengawasan Pengendalian	-	Melakukan pendataan mengenai urbanisasi dan pengendalian migrasi masuk dan keluar	
Lahan Perkotaan		Pemugaran		Rehabilitasi bangunan gedung
Bangunan Gedung	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Kampanye lingkungan rumah sederhana sehat	Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali seusai kondisi semula Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bangunan tidak layak huni
Jalan Lingkungan	Pengawasan Pengendalian	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai standar jalan lingkungan	Peningkatan kapasitas infrastruktur permukiman
Air Minum	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Penyediaan jaringan air minum Peningkatan kapasitas air minum permukiman
Drainase Lingkungan	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	Peremajaan	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai kebersihan lingk.	Peningk. kapasitas saluran drainase permukiman
	Pengawasan Pengendalian Pemberdayaan	-	Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masy. mengenai pembangunan drainase lingk.	-
Saluran Air Limbah	Pemberdayaan	Peremajaan	Pendampingan dan pelayanan informasi	Peyediaan saluran air limbah permukiman Peningkatan kapasitas saluran air limbah permukiman
Proteksi Kebakaran	Pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Sosialisasi Pencegahan penanggulangan kebakaran	Penyediaan hydrant kebakaran pada unit-unit lingkungan permukiman
RTH	• Pengawasan • Pengendalian • Pemberdayaan masyarakat	Pemugaran	• Penyiapan RTH privat pada unit-unit lingkungan permukiman	Penyiapan lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau publik
Tingkat Pendidikan	Pengawasan dan Pemberdayaan masyarakat		Melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan	
Pendapatan masyarakat	Pengawasan dan pemberdayaan masyarakat		• Pemberian pelatihan bagi masyarakat angkatan kerja terkait keterampilan yang aplikatif sehingga	
Jenis Pekerjaan				

Aspek Yang Diamati	Konsep Penanganan		Strategi Penanganan	
	Pencegahan	Peningkatan	Pencegahan	Peningkatan
			menjadi modal mencari pekerjaan	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi UMKM</li> </ul>	
Tata ruang	Pemberdayaan Masyarakat		Pemberian sosialiasi tentang pentingnya KKPR	

Sumber: Hasil Analisis, 2022

#### 4. KESIMPULAN

Menurut pendapat para *expert*, faktor penyebab kekumuhan di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu yaitu faktor sosial ekonomi dan faktor sarana prasarana. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pendapatan masyarakat, banyaknya masyarakat yang tidak bekerja dan rendahnya tingkat pendidikan, sedangkan untuk faktor sarana prasarana disebabkan karena kondisi proteksi kebakaran, kondisi persampahan, dan kondisi air bersih.

Arahan pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh di Kawasan Biringjene, Kecamatan Binamu untuk variabel urbanisasi yaitu pencegahan dengan pola pengawasan dan pengendalian sedangkan untuk variabel lahan perkotaan dengan konsep peningkatan kualitas dengan pola pemugaran. Untuk variabel sarana prasarana dengan arahan penanganan berupa pencegahan dan peningkatan kualitas dengan pola pengawasan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat, pemugaran, dan peremajaan. Untuk variabel sosial budaya dengan arahan penanganan berupa pencegahan dengan pola pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk variabel tata ruang dengan arahan pencegahan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, 2009. "Perumahan dan Permukiman di Indonesia". PT Almunia, Bandung
- Badan Pusat Statistik. (2021). Kecamatan Binamu dalam Angka 2020. Jenepono: Badan Pusat Statistik
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2018). *Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (No. 14 Tahun 2018)*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: Indonesia
- Ma, L., Wang, L., Wu, K.-J., & Tseng, M.-L. (2018). Assessing co-benefit barriers among stakeholders in Chinese construction industry. *Resources, Conservation and Recycling*, 137, 101–112. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.05.029>
- Pemerintah Kabupaten Jenepono. (2016). *Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Jenepono (No.299-a Tahun 2016)*. Pemerintah Kabupaten Jenepono: Indonesia
- Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process—What it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 9(3–5), 161–176. [https://doi.org/10.1016/0270-0255\(87\)90473-8](https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8)
- Sastra M, Suparno dan Endy Marlina. 2006. *Perencanaan & Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: ANDI.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23 ed.)*. Penerbit Alfabeta
- Undang-undang Republik Indonesia. (2011). *tentang Perumahan dan Permukiman (No.1 Tahun 2011)*. Sekretariat Negara: Indonesia
- Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.